



Sumber: Asumsi.co

Judul Skripsi:

**Strategi Advokasi NGO Indonesia Corruption Watch dalam Menolak
Pengesahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana
Ilmu Politik

NAMA : Muhammad Hanalfi Ibro

NIM : 2110413181



**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
VETERAN JAKARTA**

**STRATEGI ADVOKASI NGO INDONESIA CORRUPTION
WATCH DALAM MENOLAK PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG KPK NOMOR 19 TAHUN 2019**



SKRIPSI

MUHAMMAD HANALFI IBRO 2110413181

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
2025**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar:

Nama : Muhammad Hanalfi Ibro

NIM : 2110413181

Program Studi : S1 Ilmu Politik

Bilama di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka, saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 18 Juni 2025

Yang menyatakan,

 
METERAI
TEMPEL
05BAMX375234665

(Muhammad Hanalfi Ibro)

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI / TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanalfi Ibro
NIM : 2110413181
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : S1 Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Strategi Advokasi NGO Indonesia Corruption Watch Dalam
Menolak Pengesahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan Skripsi/Tugas Akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya:

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 18 Jun 2025
Yang menyatakan,



(Muhammad Hanalfi Ibro)

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,
saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Hanalfi Ibro
NIM : 2110413181
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Strategi Advokasi NGO Indonesia Corruption Watch
Dalam Menolak Pengesahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk:

1. Memberikan hak saya bebas royalti kepada Perpustakaan UPNVJ atas Penelitian karya ilmiah saya demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan atau mengalih formatkan, mengolah pangkalan data (database), mendistribusikan, serta menampilkan dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UPNVJ, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai Peneliti/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak perpustakaan UPNVJ dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan semoga digunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jakarta,
Pada tanggal : 18 Juni 2025
Yang menyatakan,



(Muhammad Hanalfi Ibro)

PENGESAHAN SKRIPSI DAN TUGAS AKHIR JURNAL

NAMA : Muhammad Hanalfi Ibro
NIM : 2110413181
PROGRAM STUDI : S1 Ilmu Politik
JUDUL : Strategi Advokasi NGO Indonesia Corruption Watch dalam Menolak Pengesahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Pembimbing



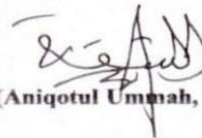
(Dr. Ardli Johan Kusuma, M.HI.)

Penguji 1



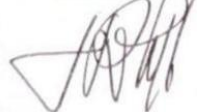
(Dr. Deni Angela, M.IP.)

Penguji 2



(Aniqotul Ummah, M.Sos)

Ketua Program Studi
Ilmu Politik



Restu Rahmawati, S.Sos., MA.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 10 Juli 2025

ABSTRAK

Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan kontroversial karena dapat memengaruhi kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW) sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki *concern* korupsi di Indonesia bergerak melakukan advokasi untuk menolak pengesahannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk membahas strategi advokasi yang dilakukan ICW dan *contentious politics* ketika ICW melakukan advokasi. Landasan teoritis penelitian ini mengacu pada teori strategi advokasi Gen dan Wright (2016) untuk mengupas strategi advokasinya dan teori *contentious politics* McAdam, Tilly, dan Tarrow (2001) untuk menyoroti skema pemenuhan tuntutan. Hasil penelitian ini ICW melakukan *Outside Strategy* (di dalam *outside/inside strategy*), *Direct Reform*, *Popular Power*, dan *Indirect Pressure*. Ketiga strategi ini memiliki kesamaan yakni melakukan kampanye yang berisikan informasi terkait revisi UU KPK melalui media sosial, mengirimkan pesan, memberikan tekanan tidak secara langsung kepada pemerintah (*outside strategy*, *popular power*, dan *indirect pressure*). Untuk *direct reform strategy*, ICW melakukan upaya advokasi dengan administrasi hukum. Dalam memahami mekanisme dan pola *contentious politics* dianalisis menggunakan *political opportunity structure*, *framing process*, dan *resources mobilization*. Pada konteks *political opportunity structure* ditemukan terdapat perbedaan kepentingan dan pendapat dengan lembaga pemerintah, DPR, dan Mahkamah Konstitusi (MK), kerekatan rezim pada saat itu yang menciptakan konsolidasi antar elite yang kuat, dan kurangnya keharmonisan antar masyarakat dengan pemerintah. Untuk *framing process*, ditemukan *Framing process* advokasi ICW menjadi aksi yang menimbulkan banyak simbolik dan memiliki sifat berkelanjutan. Upaya mengumpulkan massa agar upaya advokasi dapat berjalan dengan baik. Walaupun merangkul banyak partisipan, hambatan politik harus dihadapi ICW, konsolidasi antar elit politik pada saat itu menjadi tantangan untuk ICW.

Kata Kunci: Indonesia Corruption Watch, Advokasi, *Contentious Politics*

ABSTRACT

The ratification of the revision of Law No. 30 of 2002 into Law No. 19 of 2019 has sparked controversy because it could affect the institutional structure of the Corruption Eradication Commission (KPK). Indonesia Corruption Watch (ICW), a non-governmental organisation (NGO) concerned with corruption in Indonesia, has taken action to advocate against its ratification. This study uses a qualitative approach. The aim of this study is to discuss the advocacy strategies employed by ICW and the contentious politics involved when ICW conducts advocacy. The theoretical framework of this study draws on Gen and Wright's (2016) theory of advocacy strategies to analyse ICW's advocacy strategies and McAdam, Tilly, and Tarrow's (2001) theory of contentious politics to highlight the framework for fulfilling demands. The results of this study indicate that ICW employs Outside Strategy (within the outside/inside strategy), Direct Reform, Popular Power, and Indirect Pressure. These three strategies share commonalities, such as conducting campaigns containing information related to the revision of the KPK Law through social media, sending messages, and exerting indirect pressure on the government (outside strategy, popular power, and indirect pressure). For the direct reform strategy, ICW conducts advocacy efforts with the legal administration. In understanding the mechanisms and patterns of contentious politics, the analysis utilised political opportunity structure, framing process, and resource mobilisation. Within the political opportunity structure context, differences in interests and opinions were identified between ICW and government institutions, the House of Representatives (DPR), and the Constitutional Court (MK). The regime's cohesion at the time created strong consolidation among elites, while there was a lack of harmony between society and the government. For the framing process, it was found that ICW's advocacy framing process became an action that generated many symbolic and sustainable characteristics. Efforts were made to gather the masses so that advocacy efforts could run smoothly. Although it embraced many participants, ICW had to face political obstacles, and the consolidation among political elites at that time became a challenge for ICW.

Keywords: *Indonesia Corruption Watch, advocacy, contentious politics*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menempuh empat tahun studi Ilmu Politik di UPNVJ. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Penelitian ini dimulai sejak September 2024, dengan judul **“Strategi Advokasi NGO Indonesia Corruption Watch Dalam Menolak Pengesahan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019”**.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentunya diperlukan peran serta dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan berkat dan karunia-Nya, serta senantiasa mendampingi penulis setiap saat.
2. Ayah, Ibu, Kakak, Kakak Ipar, dan kepada seluruh anggota keluarga lainnya, Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas dukungan yang selalu menyertai penulis setiap waktu. Doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang tak terbatas adalah anugerah yang sangat berharga.
3. Diri saya sendiri, Muhammad Hanalfi Ibro yang telah berjuang untuk menyelesaikan tanggung jawab saya tepat waktu.
4. Bapak Dr. Ardli Johan, S.IP., M.HI, selaku dosen pembimbing saya yang selalu meluangkan waktu, pemikiran, memberikan saran terbaik, dan memberikan motivasi yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Luky Djuniardi Djani, S.T,MPP.Ph.D, Bapak Dr. Ardli Johan Kusuma, M.HI., dan Ibu Aniqotul Ummah, M.Sos, selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Para Dosen Prodi Ilmu Politik UPNVJ.

7. Bapak Wana Alamsyah, Bapak Sigit Wijaya, Bapak Feri Amsari, S.H., M.H., LL.M, dan Gilang Alvianto S.IP. selaku narasumber yang telah memberikan bantuan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Marsha Nadhifa, selaku teman dekat yang memberikan dukungan, teman diskusi, pemberi solusi, dorongan semangat, dan mendampingi saya selama penyusunan penelitian ini hingga saat ini.
9. Para teman saya, Alif, Taufik, Fathan, Astro yang dapat mendengarkan keluhan saya, memberikan saran, dan hiburan dalam setiap situasi.
10. Para teman kampus saya Sakha, Fadly, Rafli, Ghazi, Daffa, dan seluruh teman kampus yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu per satu, saya mengucapkan terimakasih atas dukungannya.
11. Seluruh pihak lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
12. FC Barcelona sebagai tim sepakbola yang selalu menemani penulis mengerjakan penelitian ini.

Sebagai penutup, penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya atas kehadiran dan kontribusi yang telah memberikan makna dan nilai pada penulisan ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Namun, dengan tulus, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi semua pihak.

Jakarta, 13 Juni 2024

Muhammad Hanalfi Ibro

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Batasan Masalah.....	15
1.4 Tujuan Penelitian.....	16
1.5 Manfaat Penelitian.....	16
1.5.1 Manfaat Akademik	16
1.5.2 Manfaat Praktis	16
1.6 Sistematika Penulisan.....	17
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 19
2.1 Konsep dan Teori Penelitian	19
2.1.1 Non Governmental Organization (NGO)	19
2.1.2 Teori Advokasi	20
2.2 Kerangka Pemikiran	26
 BAB III METODE PENELITIAN	 27
3.1 Objek Penelitian	27
3.2 Jenis Penelitian	27
3.3 Teknik Pengumpulan Data	28
3.3.1 Wawancara (<i>Interview</i>).....	28

3.3.2 Studi Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	29
3.4 Sumber Data	29
3.4.1 Data Primer	30
3.4.2 Data Sekunder.....	30
3.5 Teknik Analisis Data	30
3.6 Rencana Waktu.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	33
4.1.1 Profil Indonesia Corruption Watch (ICW)	33
4.1.2 Revisi UU KPK No. 30 Tahun 2002 Kedua menjadi UU KPK No. 19 Tahun 2019	41
4.2 Hasil Penelitian.....	44
4.2.1 Strategi Advokasi ICW	44
4.2.1.1 Strategi Advokasi ICW Melalui <i>Public Lobbying</i>	44
4.2.1.2 Strategi Advokasi ICW Melalui <i>Outside/Inside</i>	46
4.2.1.3 Strategi Advokasi ICW Melalui <i>Direct Reform</i>	49
4.2.1.4 Strategi Advokasi ICW Melalui <i>Popular Power</i>	53
4.2.1.5 Strategi Advokasi ICW Melalui <i>Institutional Partnership</i>	58
4.2.1.6 Strategi Advokasi ICW Melalui <i>Indirect Pressure</i>	60
4.2.2 Contentious Politics Advokasi ICW	66
4.2.2.1 Political Opportunity Structure	66
4.2.2.2 Framing Process	78
4.2.2.3 <i>Resources Mobilization</i>	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran	102
5.2.1 Saran Praktis	102
5.2.2 Saran Teoritis.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103
LAMPIRAN.....	110
Lampiran 1. Surat Riset.....	110
Lampiran 2. Transkrip Wawancara	113
Lampiran 3. Transkrip Wawancara	123

Lampiran 4. Transkrip Wawancara	140
Lampiran 5. Transkrip Wawancara	145
Lampiran 6. Transkrip Wawancara	154
Lampiran 7. Dokumentasi	158

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Survei Indikator Kepercayaan Publik Terhadap KPK	6
Tabel 1.2 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia	6
Tabel 2.1 Strategi Advokasi Gen dan Wright (2016)	22
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	29
Tabel 3.2 Rencana Waktu	31
Tabel 4.1 Komposisi Hakim Mahkamah Konstitusi Revisi UU KPK	52
Tabel 4.2 Profesi Terbanyak Melakukan Korupsi	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grafik Perbandingan Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK ..5	5
Gambar 1.2 Ajakan Aksi ICW Melalui Postingan Instagram..... 9	9
Gambar 1.3 Advokasi ICW 9	9
Gambar 4.1 Kantor Indonesia Corruption Watch 34	34
Gambar 4.2 Struktur Organisasi ICW 36	36
Gambar 4.3 Media Sosial ICW 39	39
Gambar 4.4 Slogan Reformasi Dikorupsi 48	48
Gambar 4.5 Aksi Kentongan..... 54	54
Gambar 4.6 Seruan Aksi ICW 56	56
Gambar 4.7 Public Figure Menolak Revisi UU KPK 62	62
Gambar 4.8 Ilustrasi KPK 64	64
Gambar 4.9 Rapat Paripurna Pengesahan Revisi UU KPK 73	73
Gambar 4.10 Ketua MK Anwar Usman Membacakan 76	76
Gambar 4.11 Superhero dan Gerakan Antikorupsi 80	80
Gambar 4.12 Postingan ICW menggunakan #ReformasiDikorupsi 81	81
Gambar 4.13 Postingan Ilustrasi ICW Mengenai Revisi UU KPK 06 September 2019 sampai 06 Mei 2021 83	83
Gambar 4.14 Media Sosial ICW 84	84
Gambar 4.15 Public Figure Menolak Revisi UU KPK 85	85
Gambar 4.16 Ngobrol Santai Antikorupsi (Ngobras) 92	92
Gambar 4.17 Seniman Antikorupsi: Sakti Seniman 93	93
Gambar 4.18 Pendapatan ICW 2018..... 96	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Riset.....	110
Lampiran 2. Transkrip Wawancara.....	113
Lampiran 3. Transkrip Wawancara.....	123
Lampiran 4. Transkrip Wawancara.....	140
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	145
Lampiran 6. Transkrip Wawancara.....	154
Lampiran 7. Dokumentasi.....	158